



Buletin Parlementaria

Nomor 1166/I/IX/2021 • September 2021



Keselamatan Rakyat Asas Tertinggi Hadapi Pandemi



**3 Uji Coba PTM
Dimulai, Tetap
Perlu ada Evaluasi**



**4 Negara Harus
Bisa Bangun
Ekosistem
Pertanian Milenial**



9 772614 339005



BULETIN

Keselamatan Rakyat Asas Tertinggi Hadapi Pandemi

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani dalam Peringatan HUT ke-76 DPR RI, menegaskan komitmen lembaga perwakilan rakyat yang dipimpinnya, akan mendukung kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. DPR akan memastikan kebijakan tersebut bertujuan semata-mata demi penyelamatan rakyat sebagai asas tertinggi menghadapi pandemi.

“DPR RI memiliki komitmen yang tinggi dalam mendukung berbagai upaya, kebijakan, dan program pemerintahan negara dalam menyelamatkan rakyat menghadapi pandemi dan dampaknya,” kata Puan saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna Peringatan HUT ke-76 DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (31/8).

Puan menyatakan, berbagai upaya dan kebijakan pemerintahan negara dalam menyelamatkan rakyat harus mendapatkan dukungan dari semua pihak. “Asas keselamatan rakyat merupakan asas tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintah negara untuk menghadapi krisis,” tegas politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

Lebih lanjut, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini menyatakan, negara tidak bisa berserah diri dalam menghadapi situasi Pandemi Covid-19 dan dampaknya yang luas. Disampaikan Puan, negara harus melakukan upaya-upaya terbaik agar tetap dapat menjalankan tugas-tugas tujuan bernegara, pelayanan publik, dan pembangunan nasional.

“DPR RI memberikan apresiasi dan dukungan atas upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi dan dampaknya pada bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya,” tutur mantan Menteri



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani saat menyampaikan Pidato Peringatan HUT ke-76 DPR RI. Foto: Eno/mvi

Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) tersebut.

Puan berharap pemerintah terus meningkatkan kinerjanya dalam penanganan pandemi. Hal tersebut dapat diperlihatkan melalui koordinasi kebijakan yang semakin solid, implementasi pelaksanaan penanganan pandemi yang bersinergi, dan penanganan urusan rakyat terdampak pandemi yang semakin efektif.

“DPR RI, dalam menghadapi situasi pandemi, terus melakukan upaya terbaik agar dapat menjalankan fungsi konstitusionalnya secara optimal,” jelas Puan. Meski dengan berbagai pembatasan kehadiran fisik anggota dalam rapat-rapat akibat pandemi Covid-19, DPR RI disebut akan tetap bekerja secara optimal. Puan memastikan pembatasan tersebut tidak menghalangi DPR dalam bekerja memberikan pelayanan terbaik ke rakyat.

“Tak akan mengurangi kualitas substansi dalam pembentukan Undang-Undang, pembahasan anggaran negara, pengawasan kinerja pemerintah, serta pelaksanaan diplomasi,” ungkapnya. Lebih lanjut, Puan merinci beberapa pengawasan yang dilakukan DPR untuk

memastikan kebijakan dan pekerjaan penyelenggara negara berjalan maksimal. Salah satunya adalah dengan pembentukan sejumlah Tim Pengawas dan Tim Pemantau.

“Keberadaan Tim Pengawas dimaksudkan untuk melakukan pengawasan terhadap berbagai kebijakan, baik yang dihasilkan oleh pemerintah maupun oleh DPR RI sehingga dapat dipastikan manfaatnya bagi seluruh rakyat Indonesia,” sebut Puan. Di tahun sidang ini, terdapat terdapat 9 Tim Pengawas/Pemantau yang masih ditugaskan dan 45 Panja Pengawasan yang dibentuk oleh DPR. Puan menyebut, 21 dari 45 Panja Pengawasan itu telah menyelesaikan tugasnya.

“Dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, DPR RI telah membentuk Satuan Tugas Lawan Covid-19 (Satgas Covid-19), yang bertujuan untuk memberikan respons cepat terhadap masukan dan aspirasi masyarakat yang terkena dampak Pandemi Covid-19,” tambah Puan. Rapat Paripurna diselenggarakan dengan protokol kesehatan ketat dengan memperhatikan jumlah anggota dewan yang hadir, baik secara fisik maupun virtual. ■ rdn/sf

Uji Coba PTM Dimulai, Tetap Perlu ada Evaluasi

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah segera melakukan evaluasi secara berkala terkait pelaksanaan sekolah tatap muka atau Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di 610 sekolah di beberapa wilayah DKI Jakarta yang mulai dilakukan per 30 Agustus 2021. Langkah ini menyusul diturunkannya status PPKM ke level 3.

“Seperti kita tahu, hari ini (30/8) sudah mulai belajar tatap muka di beberapa wilayah (DKI Jakarta). Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, sehingga kegiatan tatap muka yang diujicobakan di beberapa zona bisa ditambah,” kata Dasco saat ditemui awak media di selasar Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (30/8).

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) itu mengatakan, *monitoring* terhadap pelaksanaan PTM harus dilakukan untuk menjadi bahan evaluasi. Menurutnya, jika hasil evaluasi PTM dinyatakan berjalan baik, maka tidak menutup kemungkinan ada peningkatan area pelaksanaan PTM.

“Kita masih memonitor bagaimana hasil daripada kegiatan hari ini dan akan jadi bahan evaluasi untuk peningkatan area tatap muka di zona berikutnya. Apakah menimbulkan efek dari tatap muka, kita lihat hasil evaluasinya nanti, apakah tatap muka efektif atau tidak,” pungkas politisi Partai Gerindra itu.



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Tim/niw

Sebagai informasi, Dinas Pendidikan DKI Jakarta resmi mengeluarkan petunjuk teknis sekolah tatap muka mulai hari ini, Senin (30/8). Aturan teknis tersebut tertuang dalam SK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 883 Tahun 2021 tentang Penetapan Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Pembelajaran Campuran Tahap 1.

Pada tahap pertama sebanyak 610 satuan Sekolah Dasar dan Menengah yang melaksanakan uji coba PTM di DKI. Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut, dalam SK Disdik DKI tersebut, pelaksanaan PTM terbatas harus menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat. ■ ann/sf



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN REDAKSI

Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Medsos dan Website)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiaryah

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos, Erlangga Panji Samudro, S.Kom, Ridwan Budiman, S.I.P, Agung Hidayat, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destiantini, S.I.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrullli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus

FOTOGRAFER

Prima Danutirto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afrdhillah, Geraldil Opie, Hasri Mentari

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Natasya Amanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayati, Rosnita

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

PHOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

IT MEDIA DIGITAL

Muhammad Hendar Assifa, S.Kom

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eny Sulistiawati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Isfandi Mulyana, Yudi Kresna, Muhammad Ali, Mulus Karyadi,

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif Surachman, Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunnisa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO

DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Negara Harus Bisa Bangun Ekosistem Pertanian Milenial



Wakil Ketua DPR RI
Rachmat Gobel.
Foto: Tim/invl

membangun ekosistem pertanian sehingga para milenial tertarik untuk menjadi petani.

“(Pertanian) harus ada solusi terintegrasi. Tak bisa sepotong-sepotong. Jadi harus membangun ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir, dari soal modal dan inovasi teknologi hingga soal diversifikasi produk hilir pertanian,” papar Gobel dalam keterangan pers yang diterima *Parlementaria* di Jakarta, Selasa (31/8).

Pernyataan tersebut dia ungkapkan saat webinar bertajuk “Jadi Petani Milenial, Kenapa Tidak?”. Webinar ini menghadirkan Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi, Wadirut Bank BNI Adi Sulistyowati, dan Guru Besar IPB Prof Dr Ir Hermanto Siregar, MEC. Webinar ini dilatari oleh terus berkurangnya jumlah petani berusia muda dan menuanya usia petani yang masih aktif.

Oleh itu, Gobel mengajak kaum milenial untuk terjun menjadi petani. “Tapi ajak mereka dengan perspektif masa depan sambil menjadikan dunia pertanian menarik untuk ditekuni sebagai profesi yang atraktif,” ujar Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) tersebut.

Dia menyadari tengah pandemi ini, petani tetap bekerja sehingga kebutuhan pokok terpenuhi. Dengan produktivitas petani negara dapat memenuhi kebutuhan pangannya. Gobel pun mengungkapkan, akibat perubahan iklim dan terus bertambahnya penduduk dunia, masa depan dunia bisa terancam oleh krisis pangan. “Jadi, Indonesia yang memiliki lahan yang luas dan subur harus

menjadi lumbung pangan dunia,” kata Gobel lebih lanjut.

Pemikiran strategis seperti itu, katanya, penting untuk dipahami milenial. Gobel mengungkapkan berdasarkan kunjungannya ke berbagai daerah di Indonesia, ia mendapati petani muda sangat bersemangat bertani. Hanya ia mengingatkan bahwa petani dihipit masalah yang rutin mereka hadapi. “Saat tanam sulit dapat pupuk dan bibit, saat panen harga jatuh. Hal-hal ini membuat petani harus menghadapi hal-hal di luar masalah bercocok tanam. Semua itu di luar kendali petani,” kata politisi Partai NasDem itu.

Untuk itu ia mengusulkan penguatan kelembagaan petani seperti koperasi. Menurut Gobel saat ini, petani menghadapi kesulitan permodalan dan keterbatasan sentuhan teknologi pertanian seperti traktor dan mesin pengering gabah. Menurutnya petani Indonesia umumnya masih butuh bantuan permodalan untuk bisa bertani secara modern. “Produktivitas komoditas juga masih rendah. Ini yang membuat pertanian tidak atraktif secara ekonomi,” kata Gobel lebih lanjut.

Karena itu, Gobel menyarankan agar selalu ada inovasi untuk meningkatkan kualitas bibit, pupuk, dan peralatan pertanian. Dia bercerita tentang pengalamannya saat uji coba demplot pertanian padi dengan pupuk non subsidi. “Memang harga pupuknya lebih mahal, tapi hasilnya meningkat dua kali lipat dan keuntungan petani juga naik berlipat. Apalagi jika gabah hasil panen langsung masuk mesin pengering maka kualitas beras menjadi premium dan potensi kehilangan menjadi zero,” jelasnya. ■ eko/sf

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengatakan, pertanian merupakan fondasi ekonomi nasional, sektor strategis yang harus dijaga. Selain menyerap banyak tenaga kerja, pertanian dan para petani merupakan penjaga harkat dan martabat bangsa. Dia pun mengingatkan, agar para pemangku kebijakan mampu

DPR Sepakat Anggaran Pendidikan Harus Tepat Sasaran

Wakil Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) DPR RI Abdul Muhaimin

Iskandar menyatakan sepakat dengan tuntutan mahasiswa agar semua anggaran pendidikan di masa pandemi Covid-19 difokuskan untuk menjamin keberlanjutan pendidikan. Konsekuensinya alokasi anggaran untuk pembangunan fisik yang tidak substantif sebaiknya dihentikan sementara.

“Saat ini yang penting bagaimana penyelenggaraan pendidikan baik di level dasar, menengah dan tinggi bisa dilanjutkan. Tidak ada anak yang putus kuliah, tidak ada mahasiswa yang harus drop out karena persoalan biaya,” ujar Gus Muhaimin, sapaan akrab Abdul Muhaimin Iskandar saat dialog nasional dengan mahasiswa bertajuk ‘Pandemi Tak Henti, UKT Kian Tinggi’ secara virtual, Rabu (1/9).

Dalam dialog tersebut, Gus Muhaimin mengatakan situasi pandemi saat ini memberikan dampak luar biasa bagi setiap lini kehidupan bernegara. Pandemi yang berlangsung hampir dua tahun ini juga membuat anggaran negara terkuras untuk membiayai pemulihan ekonomi, penanganan kesehatan, maupun mengurangi dampak sosial.

“Kami meminta Komisi X menyisir anggaran pendidikan 20 persen APBN harus difokuskan pada program anggaran yang tepat sasaran. Biaya kuliah harus jadi prioritas, kebutuhan

dasar harus diutamakan dibandingkan dengan kegiatan lain yang tidak relevan pada penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi,” katanya.

Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai saat ini memang banyak dijumpai kasus mahasiswa yang kesulitan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Padahal di satu sisi pemerintah telah mengalokasikan skema bantuan UKT bagi mahasiswa.

“Kami berharap agar persoalan UKT ini bisa segera diselesaikan.

Lakukan terus koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Baik mengkomunikasikan melalui Komisi X agar tersampaikan kepada Kemendikbudristek maupun kepada rektorat sehingga kasus-kasus UKT di lapangan bisa terselesaikan dengan baik,” ujar Gus Muhaimin.

Selain itu, legislator dapil Jawa Timur VIII ini mengaku kaget saat mengetahui ada lima mahasiswa di Madura yang ditahan setelah melakukan unjuk rasa terkait UKT. Dalam waktu dekat dirinya akan berkoordinasi dengan Kapolri untuk mencari jalan terbaik menyelesaikan kasus hukum lima mahasiswa itu.

Ke depan, Gus Muhaimin berpesan agar konsep kuliah *online* terus dimatangkan. Menurutnya, di masa depan kuliah *online* khususnya untuk pendidikan tinggi menjadi sistem yang tidak bisa terpisahkan. “Kuliah *online* harus terus diperbaiki karena kedepannya diprediksi menjadi model pendidikan ke depan,” katanya. ■ **bia/sf**



Wakil Ketua DPR RI
Abdul Muhaimin
Iskandar. Foto: Tim/nvl

Komisi I Apresiasi Lanal Semarang Dukung Operasional KRI TNI AL



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono bertukar cenderamata dengan Danlanal Semarang. Foto: Puntho/nvl

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono mengapresiasi visi dan misi seluruh satuan Tentara Nasional Indonesia Pangkalan Angkatan Laut (TNI Lanal) Semarang atas tugas pokok dan fungsi Lanal Semarang. Bambang mendukung langkah Lanal Semarang yang kerap memberikan dukungan operasional, baik administrasi dan logistik bagi unsur-unsur Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) maupun pesawat udara TNI AL.

Demikian disampaikan Bambang saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dalam pertemuan dengan Lanal Semarang dipimpin Komandan Lanal (Danlanal) Kolonel Laut (P) Nazarudin CHRMP didampingi Perwira Pelaksana (Palaksa) dan segenap perwira staf Lanal Semarang dengan protokol kesehatan ketat

di Gedung Mandalika Mako Lanal Semarang, Jawa Tengah, Jumat (27/8).

“Melihat visi dan misi Lanal Semarang yang begitu luar biasa, patut kiranya Komisi I DPR RI memberikan apresiasi kepada seluruh satuan TNI Lanal Semarang atas tugas pokok dan fungsi. Dimana, Lanal Semarang kerap kali memberikan dukungan administrasi dan logistik bagi unsur-unsur KRI maupun pesawat udara TNI AL,” ujar Bambang dalam sambutannya.

Tak hanya itu, politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut juga memberikan apresiasi terhadap Lanal Semarang yang bahkan mengutamakan pengawasan pasukan Marinir yang singgah dalam rangka melaksanakan tugas operasi maupun latihan di wilayah kerja Lanal Semarang. Di antaranya, dengan memberikan berbagai dukungan yang dibutuhkan pasukan marinir itu.

Sementara itu, Danlanal Semarang Kolonel Laut (P) Nazarudin, CHRMP dalam sambutannya memaparkan bahwa merupakan suatu kebanggaan tersendiri untuk Lanal Semarang dikunjungi langsung Komisi I DPR RI. Danlanal juga menyampaikan laporan antara lain tentang tugas pokok, situasi kondisi wilayah kerja, alutsista serta mengusulkan peningkatan nama Lanal Semarang menjadi Lanal Jawa Tengah.

Merespon hal tersebut, Bambang menyatakan keseluruhan masukan dari Lanal Semarang akan menjadi bahan bagi Komisi I DPR RI dalam merumuskan kebijakan melalui fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Terlebih, kunjungan ini merupakan bagian dari tugas Komisi I DPR RI untuk mengetahui dan melihat secara langsung situasi dan kondisi satuan TNI yang ada di daerah. ■ pun/sf

Komisi I Dukung Penanganan Pandemi dan Program Vaksinasi oleh Lanud Adisutjipto

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI memberikan apresiasi kepada Satgas Covid-19 Lanud Adisutjipto dalam menjalankan perannya terkait penanganan pandemi Covid-19 dan pelaksanaan program vaksinasi nasional sesuai tugas pokok TNI. Selain itu, Komisi I DPR RI juga mendorong Satgas Covid-19 Lanud Adisutjipto menyelenggarakan vaksinasi nasional yang mampu menjangkau masyarakat secara luas di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto mengungkapkan hal tersebut saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi I DPR RI dengan Danlanud Adisutjipto Kolonel Pnb M. Yani Amirullah beserta jajaran, di Yogyakarta International Airport (YIA) Kulon Progo, DIY, Jumat (27/8). Usai pertemuan, Tim Kunspek Komisi I DPR RI meninjau langsung kegiatan vaksinasi Covid-19 di kawasan Bandara YIA.

“Vaksinasi di sini berjalan tertib. Mereka (peserta vaksinasi) registrasi, lalu antre untuk menunggu dipanggil. Setelah vaksin mereka observasi dulu selama 30 menit. Mereka (Lanud Adisutjipto) satu jam bisa vaksinasi 300 orang. Target mereka per harinya 2.500 orang, sekarang bisa 3 ribu orang, bahkan lebih. Jadi memang saya lihat dari tempat vaksinnya, penyelenggaraannya, ini yang menurut saya yang paling bagus di Indonesia,” apresiasi Anton.

Politisi Partai Demokrat itu mengakui, untuk mencapai *herd community* semakin sulit, sehingga harapannya dengan vaksinasi dapat mencapai *herd protection*. “Kita berharap semua orang divaksin, jangan sampai tidak ada orang yang tidak vaksin. Saya berharap kebutuhan vaksin juga akan didukung dari produksi dalam negeri. Sehingga kita juga tidak tergantung dengan vaksin dari negara lain. Ibaratnya (jika sudah produksi vaksin sendiri), kita sudah ada

payung, jadi kalau ada hujan kita sudah siap,” imbuh Anton.

Sebelumnya, Danlanud Adisutjipto Kolonel Pnb M. Yani Amirullah menjelaskan, pihaknya melakukan kegiatan vaksinasi di Lapangan Terbang Gading, Wonosari, Gunung Kidul, dan Bandara YIA, Kulon Progo sasaran penerima vaksin per harinya sebanyak 2.500 orang di masing-masing lokasi. Per 18 Agustus 2021 lalu, capaian vaksinasi di Gunung Kidul sudah mencapai 29,59 persen, dan Kulon Progo sebanyak 30,08 persen.

“Kami tidak akan berhenti melakukan vaksin sampai perintah dihentikan. Selama Covid masih ada dan program vaksinasi terus berjalan, kami akan melakukan vaksinasi. Kami juga melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk menjalankan vaksinasi, seperti komunitas, sekolah, komunitas sepeda, komunitas kendaraan, kami membuka diri,” papar Yani kepada Tim Kunspek Komisi I DPR RI. ■ sf



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto memimpin Tim Kunspek Komisi I DPR RI meninjau Vaksinasi oleh Lanud Adisutjipto. Foto: Sofyan/rvl



Foto bersama Tim Kunspek Komisi I DPR RI saat pertemuan dengan jajaran Korem 074/Warastratama di Surakarta. Foto: Ayu/mvl

Komisi I Apresiasi Peran Korem 074 Warastratama Tangani Pandemi di Solo Raya

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI yang dipimpin Anggota Komisi I DPR RI M Farhan mengapresiasi keterlibatan aktif Korem 074/Warastratama, dan pemaparan Komandan Korem 074/Warastratama Kolonel Inf Dedy Suryadi terkait penanganan Covid-19 serta program vaksinasi Covid-19 di wilayah Solo Raya.

“Kami mengapresiasi keterlibatan aktif Korem 074/Warastratama dalam menangani Covid-19 sejak munculnya kasus Covid di wilayah Solo Raya

tahun lalu,” jelas Farhan dalam pertemuan dengan Komandan Korem 074/Warastratama, para Komandan Kodim, serta Kepala Dinas Kesehatan di wilayah Solo Raya, Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (27/8).

Dukungan penanganan pandemi tersebut diantaranya berupa keterlibatan Korem 074/Warastratama dalam program vaksinasi Covid-19. Hal ini tentu sangat signifikan dengan program percepatan program vaksinasi yang belakangan tengah digalakan pemerintah pusat.

Selain itu, dalam Kunjungan Kerja Spesifik yang juga dihadiri oleh Anggota Komisi I DPR RI lainnya seperti Ahmad Syaikh, Kresna Dewanata Phrosakh, dan Ahmad Rizki Sadig itu juga terungkap peran serta Korem 074/Warastratama dalam pembagian obat Covid-19 kepada masyarakat.

Termasuk penyaluran bantuan sembako ke masyarakat Solo Raya serta melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan di wilayah Solo Raya, khususnya terkait penerapan protokol kesehatan di wilayah tersebut. ■ ayu/sf

Sistem Merit Belum Objektif Diterapkan

Sistem merit yang diterapkan dalam menilai kinerja para Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai masih belum objektif sepenuhnya. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal menilai, unsur subjektif selalu muncul tak terhindarkan, baik karena faktor kedekatan, kekerabatan, maupun politik.

“Sudahkah sistem merit dilakukan? Saya katakan sudah. Tapi, tetap ada unsur subjektif sebagai orang Indonesia. Subjektif itu tidak bisa lepas dari diri kita. Ini yang patut kita pertimbangkan,” kata Syamsurizal saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Pemerintah Kota Bandung, di Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/8). Pertemuan ini digelar untuk membincang isu-isu strategis atas revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Diketahui, sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Tujuan penerapan sistem ini untuk memastikan jabatan di birokrasi pemerintah diduduki oleh orang-orang yang profesional dan kompeten berdasarkan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN.

Komisi ASN (KASN) yang ditugasi untuk memonitor sistem merit ini, menurut Syamsurizal, tidak bisa sepenuhnya dilakukan mengingat jumlah PNS jutaan orang jumlahnya. KASN tidak mungkin melihat dari dekat prestasi para PNS untuk

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal. Foto: Husen/invl



”

SISTEM MERIT DIDEFINISIKAN SEBAGAI KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN ASN YANG BERDASARKAN PADA KUALIFIKASI, KOMPETENSI, DAN KINERJA, YANG DIBERLAKUKAN SECARA ADIL DAN WAJAR TANPA DISKRIMINASI.

promosi jabatan. Untuk kasus di daerah, para PNS mungkin akan bergantung pada kedekatan politiknya dengan kepala daerah. Jadi, sistem merit tidak benar-benar murni diterapkan.

“Pertanyaan besar saya, bisakah KASN melakukan upaya konkret untuk melihat dari dekat, apakah seseorang itu berprestasi untuk diangkat atau dipromosikan dari satu jabatan ke jabatan berikutnya. *Toh*, dia juga akan mendengar informasi dan masukan dari para wali kota, bupati, gubernur, dan menteri untuk dipromosikan,” ungkap politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. ■ mh/sf

Komisi III Dukung Digitalisasi Penanganan Perkara di MA



Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery saat memimpin rapat konsultasi Komisi III DPR RI dengan Mahkamah Agung (MA). Foto: Eko/nvi

Komisi III DPR RI melakukan rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia. Dalam rapat tersebut, Komisi III menekankan tentang dukungannya kepada MA untuk melakukan digitalisasi dalam penanganan perkara.

Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery mengharapkan dari anggaran MA yang telah dibahas dan disetujui di Komisi III bisa digunakan untuk sarana fasilitas digitalisasi dalam penanganan perkara.

“Terkait dengan virtualisasi dan digitalisasi penangan perkara tadi menjadi pokok yang kami bicarakan. Kami berharap dari anggaran yang kami berikan sebagian digunakan untuk sarana prasarana virtualisasi dan digitalisasi,” papar Herman saat memimpin rapat dengan Pimpinan MA di Gedung MA, Jakarta, Senin (30/8).

Komisi III telah memberikan tambahan anggaran kepada MA, Herman menyarankan dengan tambahan tersebut dipakai untuk melengkapi fasilitas yang kurang. Selain untuk digitalisasi dan virtualisasi dalam penanganan perkara, dia juga menyarankan agar anggaran tersebut digunakan untuk sarana dan prasarana perumahan bagi hakim-hakim di Pengadilan Tinggi Negeri.

“Kemudian sarana penunjang lainnya dalam rangka melancarkan tugas-tugas dan fungsi Mahkamah Agung,” ujar politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Dalam rapat konsultasi ini, Komisi III juga menyampaikan masukan kepada Pimpinan MA dan jajarannya terkait dengan temuan-temuan di lapangan. Komisi III memberikan perhatian pada sarana dan prasarana serta fasilitas bagi para hakim tinggi dan hakim pengadilan negeri di seluruh daerah.

Herman mendorong agar fasilitas hakim dicukupi dengan memaksimalkan anggaran yang telah disahkan. “Temuan kami tentang tidak memadainya sarana dan prasarana di lapangan,” ujar Herman. Meskipun dengan keterbatasan fasilitas Herman mengapresiasi bagi para hakim yang telah mengemban tugas dengan baik.

“Tetapi yang kami berikan apresiasi adalah, bagaimana Mahkamah Agung menjalankan tugas dan fungsi dengan keterbatasan hakim agung yang ada mampu menyelesaikan tunggakan ribuan perkara. Hal ini kami berikan apresiasi, karena sistem sarana dan prasarana dalam penyelesaian perkara menggunakan e-peradilan itu semua berjalan dengan baik, walaupun masih ada kekurangan di sana sini,” jelas Herman. ■ eko/es

Komponen Harga Pupuk Bersubsidi Perlu Dikurangi

Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka menyoroti komponen harga pupuk bersubsidi yang dinilai terlalu banyak. Menurutnya masih ada beberapa komponen harga yang seharusnya tidak dimasukkan dalam komponen harga pupuk bersubsidi. Seperti misalnya harga promosi dan komponen profit yang dinilai masih terlalu tinggi.

“Sebenarnya negara dengan negara tidak boleh untung terlalu banyak, ini kan pupuk subsidi kan negara yang subsidi, negara yang beli ke negara,” ujar Suhardi saat pertemuan Tim Kunspek Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani Komisi IV DPR RI dengan PT Pupuk Indonesia beserta anak perusahaannya di Pabrik Pupuk Kujang, Karawang, Jawa Barat, Jumat (27/8).

Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Demokrat ini menilai tidak perlu ada komponen harga promosi pada komponen harga pupuk bersubsidi. Selain itu, profit untuk PT Pupuk Indonesia yang mencapai 10 persen juga dinilai terlalu tinggi. “Profit untuk PT Pupuk Indonesia untuk pupuk bersubsidi sampai dengan 10 persen ini terlalu tinggi. Bahkan di lini 3, masih ada profit 3 persen,” tambahnya.

Menurutnya, semakin banyak komponen harga pupuk bersubsidi maka akan semakin memperkecil jumlah dan luasan pupuk bersubsidi itu sendiri. Sehingga

jika komponen-komponen tersebut dapat diminimalkan, diharapkan dapat memperbanyak jumlah pupuk bersubsidi dan mencukupi kebutuhan petani dalam negeri.

“Kan itu harga yang masuk itu adalah harga pokok produksi kemudian distribusi. Itu yang harus masuk di penentuan harga distribusi, kalau kena profit 5 persen ya, tapi kalau sampai 13 persen ya berarti kita komersil kepada negara,” tutup legislator dapil Sulawesi Barat tersebut. ■ [bia/es](#)



SEMAKIN BANYAK KOMPONEN HARGA PUPUK BERSUBSIDI MAKA AKAN SEMAKIN MEMPERKECIL JUMLAH DAN LUASAN PUPUK BERSUBSIDI ITU SENDIRI. SEHINGGA JIKA KOMPONEN-KOMPONEN TERSEBUT DAPAT DIMINIMALKAN, DIHARAPKAN DAPAT MEMPERBANYAK JUMLAH PUPUK BERSUBSIDI DAN MENCUKUPI KEBUTUHAN PETANI DALAM NEGERI.



Demi Tata Kelola yang Lebih Baik, RUU BUMN Perlu Direvisi

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan dalam rangka memperbaiki tata kelola dan kinerja BUMN, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu dilakukan pembaharuan. Untuk itu, revisi UU BUMN saat ini telah dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021.

“Proses pembahasan Naskah Akademik dan RUU tentang BUMN saat ini sedang dilaksanakan. Sehingga ke depannya UU BUMN yang baru dapat membawa hasil yang maksimal bagi perbaikan tata kelola BUMN di Indonesia agar menjadi lebih efisien, profesional, transparan

dan berdaya saing,” ucap Aria Bima di sela-sela pertemuan Tim Panja RUU tentang BUMN Komisi XI DPR RI dengan para pakar hukum UGM di D.I. Yogyakarta, Jumat, (27/8).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menambahkan, menyusun naskah akademik dan RUU BUMN akan

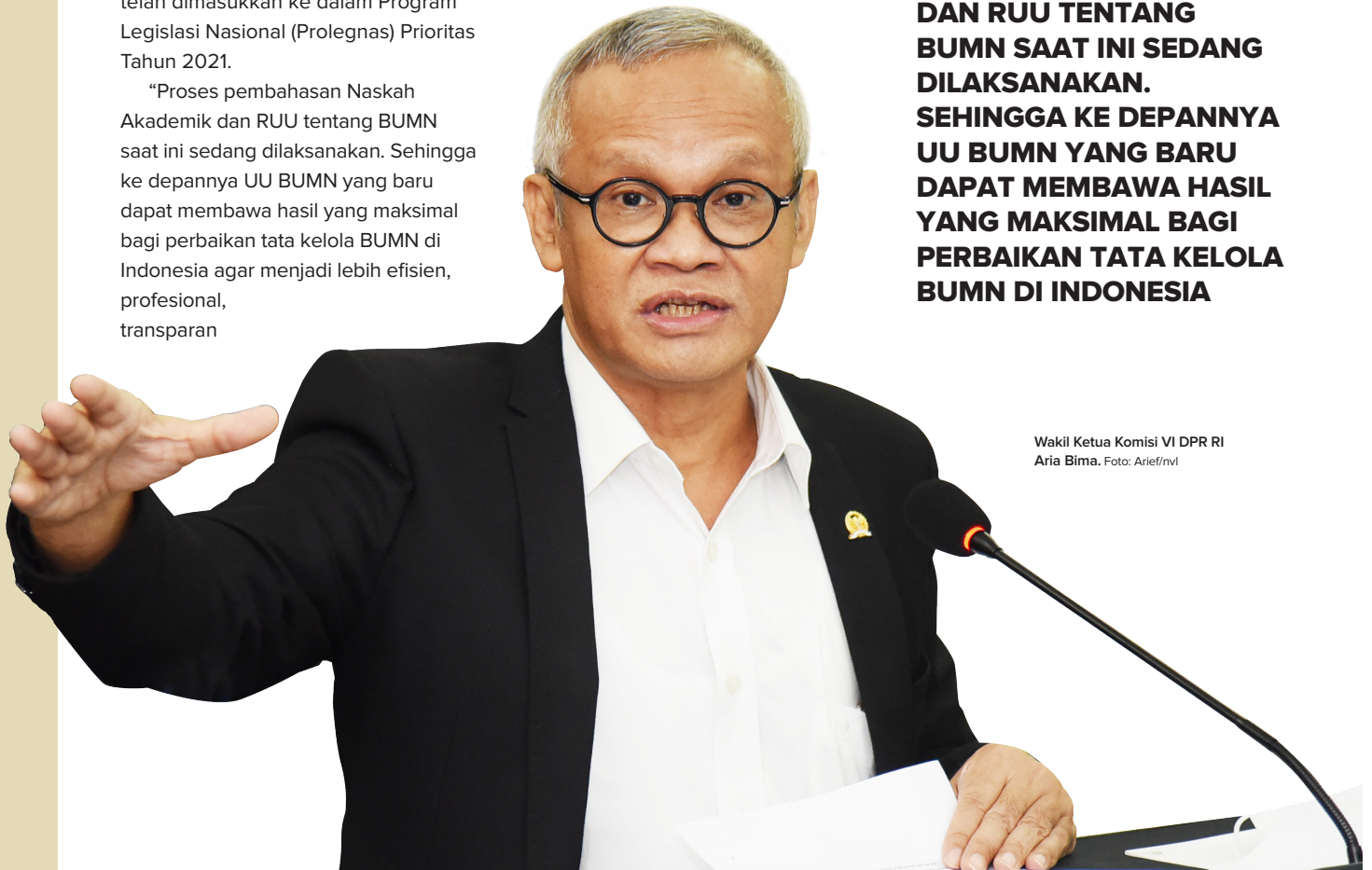
disesuaikan dengan berbagai kondisi dinamika yang berkembang baik secara nasional, regional lokal maupun global. Dirinya menginginkan UU BUMN kelak lebih antisipatif dan mampu merespons dinamika yang ada.

“Keinginan kita, BUMN tidak hanya bicara soal badan usaha yang mempunyai benefit korporasi. Tetapi juga mempunyai benefit terhadap pembangunan nasional yang saat ini. Apalagi dalam konteks *recovery* pandemi Covid-19, kita ingin BUMN menjadi instrumen pembangunan ekonomi selain APBN yang tentunya ada di dalam tata kelola pemerintah,” pungkas Aria Bima. ■ arf/es



PROSES PEMBAHASAN NASKAH AKADEMIK DAN RUU TENTANG BUMN SAAT INI SEDANG DILAKSANAKAN. SEHINGGA KE DEPANNYA UU BUMN YANG BARU DAPAT MEMBAWA HASIL YANG MAKSIMAL BAGI PERBAIKAN TATA KELOLA BUMN DI INDONESIA

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Aria Bima. Foto: Arief/nvl



Panja RUU BUMN Gali Masukan RUU BUMN dari Pakar Unpad

Tim Kunjungan Kerja Panja Penyesuaian Naskah Akademik dan RUU tentang BUMN ke Provinsi Jawa

Barat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menggelar pertemuan dengan para pakar BUMN dari Universitas Padjadjaran Bandung guna mendapatkan masukan dan informasi penting yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan draft RUU BUMN.

“Mencari masukan dari narasumber Universitas Padjadjaran. Dalam perbincangan tadi muncul beberapa isu yang selama ini memang menjadi ambigu di BUMN. Salah satunya adalah menyangkut pemisahan antara rezim keuangan negara dengan keuangan korporasi. Apa yang dimaksud dengan APBN yang dikelola secara terpisah,” tutur Hekal di Bandung, Jumat (27/8).

Menurutnya, hal ini harus menjadi salah satu isu yang diperjelas karena mempunyai dampak implikasi hukum yang berbeda. Ia menambahkan, kalau bicara keuangan negara maka itu akan berdampak kepada penyelewengan atau korupsi. Sedangkan kalau pengelolaan atau kelalaian pengelolaan keuangan korporasi dampak implikasinya ke pidana umum.

“Jadi saya rasa itu punya implikasi pada tata cara pemeriksaan, tata cara penindakan yang berbeda-beda, seperti siapa yang menindak, apa

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Mohamad Hekal. Foto: Devi/rvl



jurus-jurus hukum yang bisa dilakukan terhadap BUMN ini,” ungkap Hekal.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menilai, pemisahan itu menjadi salah satu item penting yang harus dibenahi. Termasuk juga tentang isu-isu yang muncul, seperti mengenai definisi daripada BUMN, apakah kriteria BUMN hanya kepada perusahaan-perusahaan Pemerintah Republik Indonesia yang sahamnya di atas 51 persen.

“Karena kita tahu dengan adanya *holding*-isasi dan *merger* beberapa perusahaan dan telah di-*introduce* namanya saham Dwiwarna oleh rezim pemerintahan sebelumnya, itu kan belum tertampung di dalam undang-undang,” urainya.

Hekal menjelaskan, Dwiwarna itu kan menjadi saham pemerintah kecil, lantas apakah itu juga masih memenuhi syarat BUMN.

“Ini hal-hal yang kita harus bakukan dalam undang-undang ini. Di luar itu tentu ada pula beberapa hal yang relatif penting, diantaranya tentang devinisi BUMN, pemisahan fungsinya, dan yang terakhir mengenai masalah pengelolaan aset.

Hekal juga mempertanyakan, apa yang dimaksud bahwa Menteri BUMN dapat mendirikan perusahaan pengelolaan aset. “Itulah hal-hal yang masih perlu kita perdalam lagi dalam pembahasan undang-undang ini,” pungkasnya. ■ dep/es



Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto saat memimpin Tim Kunspek VIII DPR RI ke UIN Sultan Maulana Hasanuddin. Foto: Andri/nvl

Komisi VIII Harap PTM di UIN Serang Segera Dimulai

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan, di masa pandemi Covid-19 pembelajaran jarak jauh menimbulkan kesulitan bagi peserta didik atau mahasiswa. Di antaranya jam pembelajaran yang terbatas, kuota internet, gawai, laptop atau komputer, ketersediaan internet di daerah serta kemampuan memahami materi dan kemandirian dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh.

Hal tersebut disampaikan Yandri saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Serang, Banten, Jumat (27/8). Ia berharap agar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) bisa segera dilaksanakan.

“Saat ini banyak daerah telah memasuki (PPKM) level III. Adapun kebijakan, tersebut maka daerah diperbolehkan melakukan penyelenggaraan Pendidikan Tatap Muka sebanyak 50 persen dan tetap

”

UNTUK MAHASISWA DAN MAHASISWI JUGA PARA PENGAJAR YANG AKAN MELAKUKAN BELAJAR TATAP MUKA HARUS SUDAH DI VAKSIN

memberlakukan protokol Kesehatan Covid-19 secara ketat,” ucap Yandri.

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini berharap, pihak UIN Sultan Maulana Hasanuddin mulai mempersiapkan metode pembelajaran tatap muka dengan tetap mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan peserta didik.

Di sisi lain, Yandri juga meminta UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Kanwil Kementerian Agama turut berperan aktif dalam membantu percepatan program vaksinasi nasional agar lebih optimal. “Untuk mahasiswa dan mahasiswi juga para pengajar yang akan melakukan belajar tatap muka harus sudah di vaksin,” pungkasnya. ■ man/es

Komisi VIII Apresiasi Kebijakan Layanan KUA di Tengah Pandemi

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka memberikan apresiasi beberapa kebijakan layanan Kantor Urusan Agama (KUA) di tengah pandemi. Seperti pernikahan masih boleh dilakukan oleh pasangan yang sudah mendaftar ke KUA setempat, dengan syarat pernikahan dilakukan dengan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.

“Pemakaian masker dan sarung tangan bagi pasangan dan wali, kemudian dalam satu ruangan proses akad nikah, hanya beberapa orang saja serta menjaga jarak itu sudah dilakukan oleh KUA setempat,” kata Diah saat memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dengan Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim beserta jajarannya, di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/8).

Kemudian Diah juga mengatakan KUA di Kota Bogor memiliki keunggulan dalam pelayanan, karena pelayanan menjadi hal yang utama dan penting adanya Standar Pelayanan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan inovasi. “Dengan paradigma baru ini, KUA diharapkan memiliki kualitas dan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat,” ujar Diah.

Politisi PDI-Perjuangan itu menegaskan, KUA sebagai pusat informasi dalam memberikan pelayanan juga bekerjasama dengan Pemda, bisa dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat agar mendapatkan bekal untuk kehidupan berkeluarga secara ekonomi selepas menikah.

“Bahkan KUA bisa menjalani kerja sama dengan berbagai pihak antara lain kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Bogor, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bogor,” apresiasi legislator dapil Jawa Barat III tersebut. ■ eno/sf



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka bertukar cenderamata dengan Wakil Wali Kota Bogor Didiet A. Rachim. Foto: Kresno/mvl

Gagal Salurkan Bansos, Komisi VIII Segera Panggil Bank Himbara

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mempertanyakan adanya ribuan penerima manfaat yang belum bisa mencairkan dana bantuan sosial atau gagal salur. Untuk itu, Komisi VIII DPR RI akan memanggil Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) setelah banyaknya temuan kasus bantuan sosial yang masih tersendat.

Berdasarkan temuan Komisi VIII DPR RI, sampai saat ini bantuan sosial yang belum terdistribusi antara lain 2.537 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), 5.390 KKS untuk KPM Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT) dan 1.400 KPM Bantuan Sosial Tunai (BST).

“(Bantuan belum terdistribusi) ini banyak sekali. Terlalu banyak. Misalnya 5.390 untuk BPNT pada satu kabupaten, ini kalau seluruh kabupaten/kota se-Indonesia angkanya akan besar sekali,” kata Ace dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini di Aula Gedung Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Sabilulungan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/8).

Adapun, keterlambatan pencairan dana antara lain disebabkan pemblokiran kartu, kartu yang belum terdistribusi, kesalahan data, buku tabungan yang belum terdistribusi. Politisi dari F-Golkar ini menyebut ada beberapa penyebab bantuan



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini menyalurkan bantuan untuk masyarakat Kabupaten Bandung. Foto: Anne/nvl

sosial gagal salur. Seperti alamat KPM yang salah, KPM sudah meninggal dunia, dan KPM pindah alamat. Ia pun menegaskan, semua temuan tersebut harus segera diselesaikan karena bansos ini akan terus menerus diberikan oleh pemerintah.

Ace memastikan, dalam waktu dekat pihaknya akan segera memanggil Himbara dan PT Pos sebagai mitra Kemensos dalam menyalurkan bansos. Agar bansos harus betul-betul bisa didistribusikan langsung kepada masyarakat. “Jangan sampai misalnya bantuan sosial masih terhenti gara-gara ketidakjelasan alamat, penerimanya tidak tahu siapa dan itu tidak dilaporkan kepada kita semua, kami ingin semua

memastikan bahwa bantuan sosial itu disalurkan,” tegas Ace.

Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan setelah melakukan *monitoring* di lapangan, ternyata di beberapa daerah masih banyak kendala yang sama terkait pendistribusian bantuan sosial. Kendala yang paling utama menurutnya adalah terkait data. “Jadi memang data yang saya lihat alamatnya hanya kampung saja, tidak ada RT atau RW, sehingga pihak bank penyalur kesulitan untuk mendistribusikannya. Jadi bank juga

tidak mau karena alamatnya tidak jelas dan ternyata PT Pos juga mengalami kesulitan yang sama,” katanya.

Risma menambahkan, pihaknya telah menginstruksikan kepada instansi terkait untuk segera menyelesaikan permasalahan data tersebut. Ia menjanjikan permasalahan pendistribusian dapat diselesaikan awal pekan depan. Pihaknya akan bekerjasama dengan Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Bandung. “Kita berharap Senin dan Selasa (pekan depan) itu *kelar* pembagian maupun (perbaikan) alamat-alamat yang tidak jelas,” kata Risma. ■ ann/sf

Sosialisasi Prolegnas di Papua, Baleg Tekankan Pentingnya Informasi Pembentukan Hukum Kepada Masyarakat

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melaksanakan kegiatan sosialisasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di Provinsi Papua untuk menyebarluaskan informasi Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 kepada seluruh komponen masyarakat. Dalam kesempatan tersebut Baleg DPR RI juga hendak memperoleh aspirasi dari masyarakat guna memperkaya pembahasan RUU di Baleg DPR RI.

Anggota Baleg DPR RI Sulaeman L. Hamzah menyebutkan, tujuan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat mengetahui rencana pembentukan hukum yang akan mengatur peri kehidupan masyarakat. Serta dalam proses pembentukan hukum tersebut, masyarakat dapat memberikan masukan maupun aspirasi.

“Sehingga pada akhirnya setiap RUU yang akan ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” ujar Sulaeman saat memimpin Tim Sosialisasi Baleg DPR RI di Kantor Gubernur Provinsi Papua, Jayapura, Kamis (2/9).

Dalam kegiatan sosialisasi Prolegnas kali ini, Baleg DPR RI memiliki beberapa sasaran yang hendak dicapai. Mulai dari terjalinnya komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah Daerah terkait proses pembentukan hukum yang sudah ditetapkan dalam Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-2024 dan



Anggota Baleg DPR RI Sulaeman L. Hamzah saat memimpin Tim Sosialisasi Baleg DPR RI di Papua. Foto : Agung/nvi

Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 yang dilakukan Baleg bersama pemerintah dan DPD RI.

Sasaran lainnya, kata Sulaeman, ialah terserapnya aspirasi masyarakat di daerah dan pemerintah daerah yang memiliki kepentingan terhadap beberapa atau keseluruhan RUU yang ada dalam Prolegnas. Lalu

terselenggaranya pembahasan RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional. “Harapannya dapat terwujudnya undang-undang yang aspiratif dan memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat,” pungkas politisi Fraksi Partai NasDem itu. ■ ah/sf

Fadli Zon Raih 'AIPA Distinguished Service Award'

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon meraih AIPA *Distinguished Service Award* dari ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA). Forum parlemen ASEAN tersebut menilai Fadli Zon telah berperan untuk penguatan dan pengembangan AIPA dalam merespon tantangan kawasan dan global.

Sidang Umum AIPA berlangsung pada 23-25 Agustus 2021 di Brunei Darussalam, diikuti parlemen negara ASEAN dan sejumlah parlemen negara *observer* secara virtual. Sebelumnya, di Sidang Komisi Organisasi AIPA, Fadli Zon ditetapkan untuk mendapatkan AIPA Award dan diajukan ke Sidang Umum AIPA untuk persetujuan.

Lebih lanjut, Award tersebut dikukuhkan kepada Fadli pada Penutupan SIUM AIPA ke-42 secara virtual, Rabu (25/8), yang diumumkan dari Brunei Darussalam oleh Presiden AIPA, HE Abdul Rahman Mohamed Taib. Pejabat Kedutaan Besar Indonesia di Brunei Darussalam secara simbolis menerima penghargaan itu secara luring. AIPA *Distinguished Service Award* diberikan pada Fadli Zon karena telah berperan besar memajukan AIPA dalam 7 tahun ini. Selain itu, Fadli Zon sangat aktif memajukan diplomasi parlemen di Indonesia.

Untuk diketahui, selain di AIPA, Fadli Zon juga sangat aktif di berbagai forum parlemen antara lain Inter Parliamentary Union (IPU), Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC), Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), Asian Parliamentary Assembly (APA), Global Parliamentarians Against Corruption (GOPAC), dan Wakil Presiden The League of Parliamentarians for Al Quds. Bahkan hingga ini Fadli masih menjabat sebagai Wakil Presiden GOPAC dan Presiden

Southeast Asian Parliamentarians against Corruption (SEAPAC). Di parlemen dunia IPU sebagai anggota Komisi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Fadli Zon menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan. "Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada rekan-rekan anggota DPR RI termasuk rekan-rekan di BKSAP yang telah mendukung diplomasi parlemen DPR RI selama ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat para anggota parlemen dari ASEAN yang memberi penghargaan ini," kata Fadli Zon.

Fadli Zon menilai penghargaan tersebut harus dimaknai sebagai motivasi untuk terus memajukan AIPA agar dapat lebih responsif dan representatif. "Penghargaan ini merupakan dorongan moral bagi saya

untuk mengukuhkan AIPA sebagai forum parlemen ASEAN agar lebih responsif dan mewakili masyarakat ASEAN khususnya menghadapi dinamika di kawasan Asia Tenggara," jelas politisi Partai Gerindra tersebut.

Pada sisi lain, Fadli Zon melihat bahwa sikapnya yang kerap kritis terhadap AIPA ternyata dimaknai secara positif oleh para anggotanya. "Beberapa kali saya berdebat secara konstruktif dengan para anggota parlemen ASEAN di AIPA terkait banyak isu, termasuk demokrasi dan HAM di Myanmar. Bahkan terakhir draf resolusi kita terkait Myanmar kandas. Namun dukungan para anggota parlemen ASEAN kepada saya untuk mendapatkan AIPA *Service Award* ini menunjukkan bahwa para anggota AIPA sangat terbuka, demokratis, dan obyektif," pungkas Anggota Komisi I DPR RI itu. ■ ann/sf



Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon. Foto : Arief

BAKN Serap Masukan Akademisi IPB Terkait Agraria, Tata Ruang dan Pertanian

Hasil pemeriksaan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas pelayanan pendaftaran tanah di Kementerian ATR/BPN masih menemukan berbagai permasalahan. Antara lain pelayanan pendaftaran tanah belum didukung dengan SDM yang kompeten dan cukup, proses pelayanan belum sesuai Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (SPPP) dan penggunaan aplikasi Komputersisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) belum sepenuhnya mendukung efektivitas pelayanan pertanahan.

Demikian diungkapkan Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya saat memimpin Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI dalam rangka mendapat masukan terkait telaah BAKN DPR RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tentang Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Nasional dari sivitas akademika Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/8).

“Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) BPK RI atas pengelolaan dan pertanggungjawaban pelayanan pertanahan PNPB Tahun Anggaran 2017 semester I tahun 2018 pada Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Kementerian ATR/BPN menunjukkan adanya permasalahan yang signifikan, antara lain permohonan atas pelayanan survei, pengukuran dan pemetaan tidak sesuai dengan luas bidang tanah yang sesungguhnya, dan tarif biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi atas pelayanan pengukuran dan pemetaan batas belum diatur dalam peraturan,” papar politisi Fraksi Partai Demokrat ini.



Foto bersama Tim Kunjer BAKN DPR RI dengan sivitas akademika Institut Pertanian Bogor (IPB). Foto: Ojji/mv

Wahyu dalam kesempatan tersebut meminta pandangan akademisi IPB atas sistem pertanahan di Indonesia beserta permasalahannya. Perkembangan reforma agraria/*landreform* apakah sudah sesuai dengan tujuan, juga upaya BPN mendorong transformasi digital dengan memberlakukan sertifikat tanah elektronik.

“Selain Sertifikat Elektronik, kami juga ingin mendengar paparan hasil penelitian IPB selama ini terkait permasalahan pertanahan, potensi kerugian negara, dan peran pemerintah daerah dalam pemanfaatan lahan Hak Guna Usaha (HGU),” tandas legislator dapil Sumatera Selatan II tersebut.

Guru Besar Ilmu Tanah IPB Prof. Budi Mulyanto dalam paparannya menjelaskan Reformasi Agraria (RA) berjalan lambat karena terkendala ego sektoral. Dimulai sejak tahun 1967 ketika mulai muncul Undang Undang sektoral yang berdiri sendiri dan menimbulkan konflik perundang-undangan. “Kepala Negara harus turun langsung memimpin proses reformasi agraria/*landreform* jika benar-benar ingin menyelesaikan persoalan

pertanahan yang sudah seperti hutan belantara,” tukas Prof. Budi.

Prof. Budi menengarai adanya *jungle of law* menimbulkan komplikasi hukum dan politik agraria yang tak mudah diselesaikan. Sementara ketimpangan penguasaan lahan (tenure) dan penggunaan (use) tanah terus berjalan tiap tahun seolah tak terbendung. Metode pendekatan *Omnibus Law* dengan UU Cipta Kerja menurutnya secara teoritis sudah bagus, hanya saja pelaksanaan di lapangan masih belum menggembirakan, pungkasnya.

Hadir sebagai narasumber Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB Dr. Ir Ernani Rustiadi M.Agr, Gurubesar Tetap Ilmu Tanah Fakultas Pertanian IPB Prof. Dr. Ir Budi Mulyanto MSc dan Kepala Pusat Studi Agraria (PSA) LPPM IPB Dr. Rina Mardiana, M.Si

Kunjungan kerja BAKN ini juga diikuti oleh Anggota BAKN DPR RI yaitu Hendrawan Supratikno (Wakil Ketua/PDIP), Anis Byarwati (Wakil Ketua/PKS), Mukhammad Misbakhun (Golkar), Bachrudin Nasori (PKB), Ahmad Nadjib Godratullah (PAN), dan Amir Uskara (PPP). ■ oji/sf

Sekjen DPR Dorong Pegawai Optimalkan Realisasi Anggaran Triwulan III dan IV

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, realisasi anggaran DPR RI sampai dengan triwulan II tahun 2021 baru terserap sebesar 42,27 persen. Untuk itu, ia mendorong kepada seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI agar di sisa waktu 2021 yang terbatas ini, unit kerja harus mengoptimalkan realisasi anggaran di triwulan III dan IV.

Hal tersebut ia sampaikan kepada *Parlementaria* usai acara pembukaan kegiatan rapat kerja Sekretariat Jenderal DPR RI dalam rangka melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2021 yang digelar Biro Organisasi dan Perencanaan di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/8).

“Realisasi anggaran DPR RI sampai dengan triwulan II itu ada sebesar 42,27 persen. Sedangkan realisasi anggarannya sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021 sebesar 50,68 persen. Di sisa waktu yang terbatas ini, saya minta teman-teman, unit kerja (di lingkungan Setjen DPR RI) untuk harus mengoptimalkan realisasi anggaran di triwulan III dan IV,” terang Indra lebih lanjut.

Pelaksanaan anggaran tahun 2021, dikatakan Indra masih dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, dimana hal ini telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan dan menciptakan

”

PANDEMI COVID-19 MEMUNCULKAN SEBUAH TRANSFORMASI YANG BISA DIJADIKAN MOMENTUM DALAM MELAKUKAN TRANSFORMASI DIGITAL

transformasi baru, khususnya dalam perilaku, pola kerja dan pola pikir. Ia berharap seluruh pegawai Setjen DPR RI dapat sesegera mungkin beradaptasi dengan keadaan baru tersebut.

“Pandemi Covid-19 memunculkan sebuah transformasi yang bisa dijadikan momentum dalam melakukan transformasi digital. Kita tidak perlu membuat program-program yang terlalu ambisius tapi tidak kredibel, buatlah program nyata dan realistis yang memberikan hasil bermanfaat bagi Setjen DPR RI. Pastikan yang menjadi bagian dari tugas bapak/ibu dilaksanakan dengan baik, dan ambil tanggung jawab,” jelasnya.

Indra pun sempat menyinggung akan membentuk mekanisme *reward and punishment* atas kinerja pelaksanaan anggaran yang menurutnya penting sebagai bagian motivasi pegawai. “Saat ini, belum ada mekanisme *reward and punishment* atas kinerja pelaksanaan anggaran di lingkungan Setjen DPR RI. Ke depan, perlu kiranya kita memberikan *reward and punishment* atas capaian kinerja pelaksanaan anggaran,” tandasnya. ■ *er/sf*



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar.
Foto: Chasbi/nvl



BK DPR Teken Kerja Sama dengan Universitas Pancasila



Ketua BK DPR RI Inosentius Samsul saat memberikan sambutan di Aula FH Universitas Pancasila. Foto: Hira/nvl

Badan Keahlian (BK) DPR RI melakukan penandatanganan kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Ketua BK DPR RI Inosentius Samsul menyambut baik atas respon positif yang disampaikan Rektor Universitas Pancasila dalam menjalin kerja sama di antara keduanya di masa mendatang.

“Jadi memang kerja sama ini adalah bagian dari upaya Badan Keahlian untuk mencari mitra atau menambah kekuatan, kalau boleh saya sebut demikian, karena kita ketahui isu-isu yang dibahas di DPR itu banyak sekali,” terangnya saat memberikan sambutan

”

BK DPR MEMBUKA PELUANG UNTUK KERJA SAMA LAINNYA, SEPERTI DENGAN ADANYA PUSAT STUDI PANCASILA DI UNIVERSITAS PANCASILA SEHINGGA MEMBANTU DALAM DRAFT CLEAR AND CLEAN DARI SEGI NILAI-NILAI PANCASILA.

di Aula FH Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, Selasa (31/8).

Sensi, sapaan akrab Inosentius melanjutkan, setiap naskah akademik pada Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dibahas DPR RI harus di-review dari nilai-nilai Pancasila. Karena tak jarang ketika RUU dibentuk, meski secara RUU sudah sesuai, ketika membahas pasal-pasalanya tak jarang dianggap jauh dari nilai-nilai Pancasila.

“Mudah-mudahan bergabungnya Universitas Pancasila bisa meringankan beban kami (BK DPR RI). Suatu saat, *knowledge management* yang ada di Universitas Pancasila (bisa) terkanalisasi ke DPR,” harap Sensi dalam kegiatan penandatanganan MoU yang juga diisi dengan *Forum Group Discussion* (FGD) tersebut.

Untuk kerja sama, Sensi menuturkan bahwa kerja sama yang dilakukan mendatang yakni dalam hal naskah akademik dan draf RUU. Meski dalam pertemuan ini baru berfokus dalam diskusi keimigrasian, BK DPR membuka peluang untuk kerja sama lainnya, seperti dengan adanya Pusat Studi Pancasila di Universitas Pancasila sehingga membantu dalam draft *clear and clean* dari segi nilai-nilai Pancasila.

Kegiatan yang dihadiri kalangan akademisi Universitas Pancasila dan Badan Keahlian DPR ini juga menggelar FGD “Urgensi Rancangan Undang-Undang tentang Keimigrasian (Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian)”. Kegiatan ini dihadiri beberapa pakar di antaranya Guru Besar Hukum Keimigrasian M. Iman Santoso, Lektor Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI M. Alvi Syahrin, serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila Lisdia Syamsumardian. ■ hal/sf

Sektor Pariwisata Jembrana Jadi Motor Penggerak SDGs dan Perekonomian

DPR RI memiliki peran penting dalam pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* pada tingkat nasional dan juga di tingkat lokal, dalam rangka mengakselerasi pembangunan berkelanjutan khususnya pada sektor pariwisata. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana saat memimpin kegiatan BKSAP SDGs Day di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, Selasa (31/8).

“Bali sebagai destinasi wisata utama Indonesia dan Kabupaten Jembrana secara spesifik memiliki keunggulan sektor pariwisata yang bisa dijadikan sektor penggerak pencapaian SDGs dan pemulihan ekonomi,” ungkap Putu.

Lebih lanjut Putu menyampaikan, secara geografis letak Kabupaten Jembrana sangat strategis. Jembrana menjadi pintu gerbang utama di Bali bagian barat yang menghubungkan dengan Pulau Jawa, di mana para wisatawan baik domestik maupun mancanegara banyak melakukan transit di Jembrana.

“Oleh karena itu, kami berkunjung ke Jembrana guna menyuarakan program-program yang ada di pusat, yang mungkin saja bisa disalurkan ke daerah. Jembrana memiliki potensi yang begitu luar biasa, bukan hanya

pada bidang seni budaya saja seperti makepung, jegog dan kulinernya, tetapi saya baru tahu juga potensi tenunnya yang luar biasa,” ungkapnya.

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini juga menyampaikan bahwa Jembrana juga memiliki potensi perikanan dan kelautan yang dapat menjadi kekuatan utama untuk bersinergi dengan kekuatan perekonomian sebagai destinasi pariwisata.

“Jembrana juga memiliki sekolah di bidang kesehatan sehingga dapat mencetak banyak tenaga untuk

program-program penanganan Covid-19 dan penerapan protokol kesehatan yang nampaknya akan terus wajib untuk dilaksanakan,” ujar Putu.

Sementara terkait pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi, Putu berharap segera bisa terealisasi. Seperti diketahui tol ini akan melewati 5 kecamatan di Jembrana sepanjang 54 km, nantinya total keseluruhannya sepanjang 95 km.

“Ini kita akan kawal juga, agar waktu tempuh yang sebelumnya lama bisa dipangkas sehingga lebih cepat, bukan sampai disana saja secara desain juga harus menampung kearifan lokal, agar dijalan itu juga mengakomodir masyarakat lokal untuk bisa menjual produk UMKM-nya, dan perekonomian masyarakat juga di-support. Jadi bukan jalannya saja yang penting, namun lebih kepada memberikan dampak atau sumbangsih yang besar kepada masyarakat dalam pembangunan ekonomi,” ujarnya.

“Kami hadir dari ada Komisi VI, ada Komisi IV, V, IX, XI dan komisi VIII, inilah menjadi bedanya **BKSAP** karena yang hadir adalah lintas fraksi dan lintas komisi. Jika hanya komisi yang hadir hanya fokus pada satu hal, tapi **BKSAP** hadir guna menampung berbagai hal,” pesan Putu. ■ *skr/es*



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana saat memimpin kegiatan BKSAP SDGs Day. Foto: Singgih/nvl

RS Mandaya Karawang Representatif untuk Layani Peserta Jamkestama

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso mengapresiasi kerja sama yang terjalin antara PT Jasindo dengan Rumah Sakit Mandaya Karawang, terkait dengan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) yaitu Anggota DPR RI dan keluarganya.

“Ya ini terus terang saya terkejut. Karena ada RS yang begitu bagus di Karawang yaitu Mandaya Hospital. Saya kira ini suatu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Jasindo untuk terus berupaya mencari RS-RS Provider yang berkualitas,” ucap Agung saat pertemuan dengan Direksi RS Mandaya Hospital Karawang, di Karawang, Jawa Barat, Jumat (27/8).

Agung menambahkan, selain memiliki fasilitas dan pelayanan yang baik, RS Mandaya Karawang juga memiliki tenaga medis dan dokter spesialis berpengalaman untuk

memberikan layanan diagnostik dan pengobatan jantung dan pembuluh darah 24 jam. RS Mandaya juga memberikan pelayanan dokter spesialis bedah dan anestesi yang siap untuk menangani kasus trauma dan kecelakaan.

“Dari paparan direktur RS Mandaya mengatakan di sini (RS Mandaya) menjadi pusat penanganan kanker dan trauma. Ini bagi saya luar biasa. Penanganan trauma penting karena di sini tidak hanya untuk Anggota DPR tapi trauma untuk kecelakaan kerja,” urai politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

Dengan kelengkapan fasilitas dan jenis pelayanan, Agung menyayangkan RS Mandaya masih dalam kategori tipe C. Ia berharap agar grade RS Mandaya terus ditingkatkan agar dapat melayani masyarakat sebaik mungkin tanpa perlu jauh-jauh ke ibu kota.

“Ya harapan saya, Mandaya yang di Karawang ini bisa mengikuti

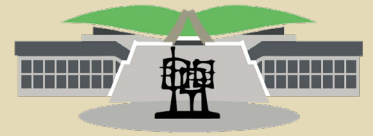
”

RS MANDAYA KARAWANG JUGA MEMILIKI TENAGA MEDIS DAN DOKTER SPESIALIS BERPENGALAMAN UNTUK MEMBERIKAN LAYANAN DIAGNOSTIK DAN PENGOBATAN JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH 24 JAM

Mandaya yang di Jakarta, kalau di Jakarta saya kira sudah kelas A ya, jadi kami berharap terus berusaha meningkatkan tidak hanya C naik ke B sampai ke A lah, karena agar fokus pasien itu tidak ke Jakarta kalau ada di daerah kenapa harus jauh-jauh ke Jakarta,” tutupnya. ■ ndy/es



Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso saat menyerahkan cenderamata kepada Direktur RS Mandaya Hospital Karawang. Foto: Nadia/hvl



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat mengunjungi Sentra Vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan oleh HIPMI dan Maming Enam Sembilan Group di Pasar Ikan Modern Muara Baru, Jakarta Utara, Kamis (2/9). Foto: Eno/nvl



Sekjen DPR RI Indra Iskandar memimpin pengambilan sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, dan Fungsional di lingkungan Setjen DPR RI, di Ruang Pustakaloka, Senayan, Jakarta, Kamis (2/9). Foto: Andri/nvl



Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI menyerahkan sumbangan dengan mendatangi sejumlah yayasan yatim piatu, pesantren untuk para dhuafa dan rumah autis di Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (31/8). Foto: Ayu/nvl